

**RENDAHNYA PERAN SISTEM KADERISASI POLITIK DI DPD PSI KOTA
SEMARANG: STUDI PADA CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
PEMILU 2024**

Pungky Kumala Sari¹, Kushandajani²

Email: pungkykumalasari71@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Politik keterwakilan perempuan memiliki landasan kebijakan afirmatif yang mewajibkan keterwakilan 30% dalam pencalonan legislatif. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan capaian menggembirakan pada Pemilu 2024 dengan meloloskan tiga calon anggota legislatif perempuan ke DPRD Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sistem kaderisasi yang diterapkan DPD PSI Kota Semarang dalam mempersiapkan kader perempuan serta mengkaji implikasi dinamika sistem kaderisasi terhadap partisipasi, akses, dan kapasitas politik perempuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI. Data dianalisis menggunakan teori politik gender dan teori kaderisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekrutmen PSI bersifat terbuka dan inklusif, memberikan akses luas bagi siapapun yang ingin bergabung. Namun mekanisme rekrutmen dan sistem kaderisasi secara formal belum cukup membantu anggota memperoleh akses dan kapasitas organisasi secara memadai. Tidak terdapat kurikulum baku dan berjenjang yang ketat, sementara frekuensi pelatihan bersifat insidental mengikuti momentum politik. Keberhasilan tiga caleg perempuan PSI di Kota Semarang lebih banyak dipengaruhi oleh kapasitas individu daripada intervensi sistem kaderisasi. PSI berhasil memenuhi kuota keterwakilan perempuan secara administratif, namun penguatan struktur organisasi dan formalitas kaderisasi perlu ditingkatkan untuk menjamin partisipasi politik perempuan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Kaderisasi, Politik Gender, Perempuan, *Affirmative Action*

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Women's representation politics has a foundation of affirmative action policies that require 30% representation in legislative nominations. The Indonesian Solidarity Party (PSI) showed encouraging results in the 2024 Election by passing three female legislative candidates to the Semarang City Council. This study aims to analyze the role of the regeneration system implemented by the Semarang City PSI Regional Representative Council in preparing female cadres and examine the implications of the dynamics of the regeneration system on women's political participation, access, and capacity. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews with PSI administrators, cadres, and legislative members. Data were analyzed using gender politics theory and cadre theory. The results show that the PSI recruitment system is open and inclusive, providing broad access for anyone who wants to join. However, the formal recruitment mechanism and cadre system have not sufficiently helped members gain adequate organizational access and capacity. There is no strict, standardized curriculum, and training frequency is incidental, following political momentum. The success of three female PSI candidates in Semarang City was more influenced by individual capacity than by intervention from the cadre system. PSI has succeeded in fulfilling the administrative quota for women's representation, but strengthening organizational structures and formalizing cadre development needs to be improved to ensure sustainable women's political participation.

Keywords: *Cadre System, Gender Politics, Women, Affirmative Action*

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia telah diatur secara eksplisit melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 245 ayat (2) mewajibkan partai politik peserta Pemilu menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu Pasal 7 poin E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mengamanatkan rekrutmen politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang pertama kali memperkenalkan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Kebijakan afirmatif ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan selama ini mengalami penindasan multidimensional yang berakibat pada rendahnya partisipasi di

ranah publik. Beban ganda antara urusan domestik dan pekerjaan publik, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, serta kemiskinan struktural yang dialami perempuan menjadi sistem yang memenjarakan mereka dari partisipasi politik. *Affirmative action* hadir sebagai upaya memberikan perlakuan khusus kepada kelompok terpinggirkan agar memperoleh kesempatan setara dengan kelompok dominan (Yuliantri, 2021). Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini difokuskan pada perempuan yang masih terpinggirkan dalam proses pencalonan di internal partai maupun kontestasi pemilu.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menarik untuk dikaji karena menunjukkan capaian signifikan dalam keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024. Partai yang berdiri tahun 2014 dan mengusung semangat anak muda ini berhasil meloloskan tiga calon anggota legislatif perempuan ke DPRD Kota Semarang. Pada tingkat nasional, PSI mengajukan 38,79% caleg perempuan dari keseluruhan calon yang diajukan, melebihi syarat minimal 30%. Capaian ini

menunjukkan konsistensi setelah pada Pemilu 2019 PSI mengajukan 45% caleg perempuan (KPU, 2024).

Kaderisasi menjadi kunci utama bagi partai politik dalam mencapai tujuannya. Kader adalah penggerak partai yang menentukan arah perjalanan organisasi. Menurut Panebianco (1988), kaderisasi merupakan mekanisme utama yang memastikan stabilitas organisasi partai dan transmisi nilai-nilai serta strategi partai kepada generasi berikutnya. Partai politik kader memiliki struktur kaderisasi terstruktur, terpusat, dan bertujuan membentuk anggota berdasarkan ideologi partai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sistem kaderisasi yang diterapkan DPD PSI Kota Semarang hingga berhasil meloloskan tiga caleg perempuan pada Pemilu 2024, serta mengkaji implikasi sistem kaderisasi terhadap akses dan kapasitas politik kader perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena sistem kaderisasi politik di DPD PSI Kota Semarang beserta implikasinya terhadap calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti memerlukan pemahaman mendalam terhadap proses, dinamika, dan makna di balik praktik kaderisasi yang berlangsung. Situs penelitian dilaksanakan di DPD PSI Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan pertimbangan bahwa partai ini berhasil meloloskan tiga caleg perempuan pada Pemilu 2024 sehingga menarik untuk dikaji sistem kaderisasinya. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, meliputi pengurus kaderisasi partai, kader atau

anggota partai, serta anggota DPRD Kota Semarang periode 2024-2029 dari fraksi PSI. Total informan berjumlah sembilan orang, terdiri dari Ketua DPD PSI Kota Semarang, Sekretaris DPD, Ketua Divisi Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), serta enam orang caleg perempuan dari enam daerah pemilihan di Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berbentuk transkrip wawancara, sumber literatur, dan foto dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder dari dokumen partai, jurnal, buku, dan website resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedoman terstruktur namun fleksibel, observasi partisipatif di lingkungan partai, dan dokumentasi kegiatan kaderisasi serta arsip partai.

Analisis data menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi teori. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mempertahankan objektivitas data. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis, yaitu teori politik gender dan teori kaderisasi, untuk menggambarkan kompleksitas hasil penelitian dari berbagai sudut pandang. Kualitas data dijaga melalui pembacaan ulang, pengelompokan data berdasarkan tema, pencarian pola antar data, serta pemaknaan esensi dari setiap informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Rekrutmen dan Sistem Kaderisasi DPD PSI Kota Semarang

Penyeleksian Kader

DPD PSI Kota Semarang menerapkan sistem rekrutmen terbuka sepanjang waktu tanpa batasan musiman. Sekretaris DPD PSI Kota Semarang menyampaikan: Rekrutmen semacam itu menegaskan prinsip inklusivitas partai modern yang diusung PSI. Namun fluktuasi pendaftar menjelang pemilu mengindikasikan bahwa rekrutmen masih dipengaruhi momentum politik elektoral. Karakter ini mencerminkan partai yang adaptif secara pragmatis ketimbang berorientasi pada pembinaan ideologis berkelanjutan. Rekrutmen menjelang pemilu dapat dimaknai sebagai mobilisasi elektoral, bukan regenerasi struktural dan ideologis.

Untuk menjaga kualitas, PSI tetap melakukan seleksi awal melalui tes tertulis yang mengukur pemahaman dasar tentang partai. Upaya menyisipkan pemahaman ideologis melalui seleksi awal menunjukkan kesadaran partai akan pentingnya internalisasi nilai. Namun demikian, pendidikan ideologis yang mendalam baru diperoleh di jenjang selanjutnya. Temuan ini mengonfirmasi bahwa sistem kaderisasi DPD PSI Kota Semarang menunjukkan kecenderungan terbuka pada seleksi awal, namun intensitas penguatan pengetahuan politik dan ideologi sangat dipengaruhi momentum pemilu. Dengan kata lain, sistem kaderisasi masih berorientasi pada kontestasi elektoral.

Pelatihan Politik dan Pembinaan Internal

Pendidikan politik berfungsi membekali kader dengan pengetahuan dan strategi menarik simpati pemilih (Nurdin dan Fatkhuri, 2022). Pemahaman politik dan strategi pengembangan partai menjadi modal dasar yang harus dimiliki seluruh kader. Kaderisasi politik mencakup tiga tahapan: pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan. Informan yang merupakan sekretaris DPD PSI Kota Semarang

menyatakan, "Kita memiliki jenjang kaderisasi yang akan diikuti oleh kader-kader kita, jenjang tersebut meliputi dasar, madya, dan paripurna." Pernyataan ini menarik karena Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI Pasal 13 justru menyebutkan lima jenjang kaderisasi: Kader Tunas (anggota yang belum mengikuti pengkaderan), Kader Dasar (mengikuti pelatihan Pimpinan Daerah/Cabang/Organisasi Sayap), Kader Madya (pelatihan Pimpinan Wilayah), Kader Paripurna (pelatihan Pimpinan Pusat), dan Kader Istimewa (tokoh berkapasitas tanpa melalui jenjang reguler).

Perbedaan antara ketentuan formal dengan implementasi di lapangan menunjukkan ketidaksinkronan aturan legal dengan praktik organisasi. Dalam perspektif institusionalisme, fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara desain formal dan realitas operasional, mengindikasikan bahwa sistem kaderisasi PSI secara vertikal belum terkonsolidasi secara sinkron.

Sedangkan terkait materi kaderisasi, Sekretaris DPD memaparkan, "pada tingkat dasar akan dikenalkan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi untuk dasar, ya lebih banyak ke doktrin partai. Terus di madya itu sendiri ada penambahan tentang materi manajerial. Di paripurna akan ditambahkan materi-materi kepemimpinan." Meskipun menunjukkan kematangan konsep kurikulum dengan pola progresif, implementasinya tidak berjalan konsisten. Pelaksanaan jenjang kaderisasi mengalami simplifikasi dan sulit dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini menciptakan paradoks, yaitu sistem terstruktur secara normatif namun fleksibel secara empiris.

Proses seleksi untuk mengikuti kaderisasi lanjutan dilakukan melalui kombinasi tes tertulis dan wawancara, dengan dominasi penilaian pada metode wawancara. Seorang

caleg dari Dapil 6 menyampaikan bahwa proses seleksi didominasi wawancara yang memungkinkan evaluasi subjektif terhadap kapasitas dan keselarasan individu dengan kriteria partai. Namun, intensitas kegiatan kaderisasi belum menunjukkan konsistensi kuat, sebagaimana diakui Sekretaris DPD: "Kami juga sering mengadakan pelatihan atau kaderisasi politik ketika ada momentum politik." Hal ini menegaskan bahwa sistem kaderisasi banyak dipengaruhi dan berorientasi pada kebutuhan elektoral.

Penerapan Sistem Kaderisasi

PSI sebagai partai dengan semangat anti korupsi dan anti intoleransi menyusun kurikulum kaderisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Seorang caleg dari Dapil 1 menjelaskan: "Terkait kaderisasi memang disesuaikan dengan daerah masing-masing, penyesuaian tersebut diukur berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kota tersebut. Misalnya pada kaderisasi di Kota Semarang dilakukan penyesuaian kurikulum berupa penambahan materi seperti pendekatan untuk masyarakat pesisir yang sedang terkena banjir."

Pernyataan ini mencerminkan bahwa sistem kaderisasi tidak bersifat kaku, melainkan menggunakan strategi adaptif dengan kebutuhan lokal. Penekanan pada fenomena aktual di lapangan menunjukkan pendidikan kaderisasi disesuaikan dengan problematika sosial di daerah. Namun demikian, internalisasi nilai-nilai partai tetap menjadi instrumen sentral. Sekretaris DPD menegaskan: "Jadi materi yang disiapkan adalah materi untuk mendoktrin terkait dasar-dasar dari organisasi partai itu sendiri, nilai-nilai, dan tujuan dari partai juga pastinya dimasukan ke dalam setiap proses kaderisasi."

Dari perspektif kader perempuan, sistem kaderisasi dinilai cukup efektif dan suportif dalam mempersiapkan mereka menghadapi kontestasi politik. Fleksibilitas dan adaptasi yang teridentifikasi tidak serta-merta melemahkan fungsi kaderisasi. Dukungan organisasi justru dipersepsikan sebagai kekuatan utama, meskipun pengakuan perlunya evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas belum bersifat final.

Implikasi Dinamika Sistem Kaderisasi terhadap Akses dan Kapasitas Politik Perempuan

Pengaruh Sistem Kaderisasi terhadap Akses Politik Perempuan

PSI berupaya mendorong kader perempuan menjadi pemimpin melalui pendampingan dan dukungan intensif. Seorang kader perempuan menyampaikan: "Sebagai perempuan kami didukung penuh oleh PSI, banyak senior yang mendukung kami seperti konsultasi dan sharing pengalaman. Hal tersebut benar-benar memberikan kami ilmu." Dukungan interpersonal melalui mentoring dan konsultasi menunjukkan signifikansi penguatan solidaritas kader dalam mencapai tujuan partai. Namun hal ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kader perempuan cenderung bersifat personal ketimbang terinstitusionalisasi melalui sistem kaderisasi formal.

Kader perempuan lainnya juga merasakan dukungan serupa: "Saya tidak terlalu mengalami kendala karena dalam proses kemarin saya dibantu oleh banyak pihak, baik itu internal hingga eksternal. Jadi kita mau menjalankan diri apapun selalu didukung, apapun setempat juga mari kita sama-sama kalau memang untuk kemajuan yuk nggak ada kendala yang bagaimana-bagaimana, jadi masih oke lah kita terbantu dengan sesama."

Kedua pernyataan menunjukkan bahwa caleg perempuan PSI Kota Semarang secara konsisten merasakan dukungan internal kuat serta minim hambatan selama pencalonan. Hal ini mengindikasikan kultur organisasi yang relatif inklusif dan suportif terhadap partisipasi politik perempuan. Namun dukungan lebih banyak muncul dalam bentuk relasi interpersonal, mentoring, dan jaringan bantuan, bukan sebagai kebijakan afirmatif terlembaga secara formal. Dengan demikian, efektivitas kaderisasi perempuan di PSI Kota Semarang tampak lebih ditopang oleh kultur kolektif dan solidaritas internal dibanding desain institusional yang secara eksplisit responsif gender. Langkah ini membantu PSI memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen karena kader merasa diperhatikan dan didukung penuh partai.

Pengaruh Sistem Kaderisasi terhadap Kapasitas Politik Perempuan

Kurikulum yang baik memerhatikan seluruh kader termasuk perempuan, misalnya dengan memasukkan materi gender atau praktik langsung. Materi gender tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi juga bagi kader laki-laki agar lebih peka terhadap isu keperempuanan. Kurikulum juga harus membangun rasa percaya diri, keberanian publik, dan penguatan identitas sebagai aktor politik. Seorang caleg menyoroti perlunya pendampingan khusus: "Perbaiki sistem kaderisasi biar perempuan ini bisa lebih banyak mengikuti kontestasi pemilu, itu perbaikan sistemnya, ini perlu diadakan khusus untuk perempuan berarti perlu dibutuhkan pendampingan khusus untuk perempuan."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun PSI telah melakukan pendampingan, intensitasnya perlu ditingkatkan mengingat beban ganda

(*double burden*) yang dialami perempuan. Perempuan sering memiliki peran lebih terbuka dalam mencapai kesejahteraan keluarga, namun stigma negatif terhadap perempuan berkarir di luar rumah tangga masih kuat. Kader perempuan lain mengungkapkan: "Mengingat perempuan memiliki beban ganda seperti ibu rumah tangga, atukah bekerja juga seperti itu, tapi di sisi lain tetap ingin memperjuangkan suara-suara pemerempuan itu menjadi tantangan juga bagi kita." Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendampingan khusus bukan sekadar aspirasi tambahan, melainkan respons terhadap hambatan struktural berupa beban ganda dalam kehidupan domestik dan publik. Meskipun kultur internal DPD PSI Kota Semarang relatif suportif, sistem kaderisasi yang bersifat *gender-neutral* belum sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial tersebut.

Sayangnya, PSI belum memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Berdasarkan pernyataan informan, DPD PSI Kota Semarang memang telah menerapkan sistem kaderisasi inklusif, namun justru karena netral gender, sistem tersebut belum mampu menangkap perbedaan realitas material antara kader laki-laki dan perempuan dalam kebutuhan berkontestasi politik. Efektivitas kaderisasi perempuan tidak cukup hanya diukur dari dukungan internal partai, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu merespons struktur sosial patriarkal yang membentuk pengalaman politik perempuan.

Frekuensi Kaderisasi dan Kesiapan Menghadapi Kontestasi Politik

Sebagai partai muda, PSI belum memiliki sistem kaderisasi benar-benar terstruktur. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun secara normatif partai memiliki jenjang pengkaderan dan kurikulum formal,

implementasinya belum konsisten dan terjadwal. Sekolah kader tidak dilaksanakan reguler, belum ada mekanisme evaluasi mapan. Kondisi ini mengindikasikan kaderisasi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi sebagai sistem stabil dan berkelanjutan, melainkan sporadis dan bergantung momentum. Informan lain memberikan statemen seragam bahwa PSI belum memiliki sistem kaderisasi rigid. Frekuensi kegiatan tidak menentu: ada yang menyebut sebulan sekali, per tiga hingga enam bulan, ada pula yang menyatakan hanya digencarkan menjelang pemilu. Kegiatan sering dilaksanakan mendadak ketika situasi politik mendesak. Jika pun kader perempuan menunjukkan kapabilitas mumpuni dalam isu gender, itu merupakan usaha pribadi karena partai belum cukup stabil memberi fokus pada isu spesifik selain anti korupsi dan intoleransi. Frekuensi rendah berdampak signifikan terhadap pemahaman dan kapasitas kader: "Belum sering. Mungkin kadernya jadi kurang paham. Tidak mengenal. Bisa aja nanti lari ke partai lain."

Selain secara substansial, frekuensi rendah membatasi ruang kader saling mengenal, menghambat proses berjejaring. Minimnya interaksi antar kader—apalagi jika kegiatan dilakukan daring—semakin menegaskan individualitas kader yang berdampak buruk pada nasib partai jangka panjang. Padahal PSI mengusung nilai solidaritas sebagai branding partai. Akibatnya, DPD PSI Kota Semarang belum bisa memaksimalkan kebijakan afirmasi terhadap aktor politik perempuan. Lolosnya caleg perempuan lebih disebabkan kapasitas individu, bukan sistem kaderisasi yang memiliki pendekatan khusus mengawal kader perempuan. Bahkan, seorang responden menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum laki-laki saat ini menunjukkan penurunan keseriusan

pengawasan kader perempuan dibanding saat dipimpin Ketua Umum perempuan. Temuan ini menunjukkan korelasi antara kepemimpinan perempuan dengan tingkat kepercayaan diri kader perempuan. Dengan ketua umum perempuan, kader merasa ada ikatan senasib dan lebih dimengerti keadaannya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun individu berbeda, perempuan berbagi pengalaman kurang lebih sama yang mendorong keterbukaan satu sama lain.

Hambatan Internal dan Eksternal dalam Sistem Kaderisasi Perempuan

Hambatan Internal

Restrukturisasi yang Terlalu Sering

Sebagai partai baru, PSI masih banyak melakukan perubahan tatanan dari pusat hingga daerah. SK Pengangkatan diperbaharui setiap tahun sejak 2023, 2024, hingga 2025. Seringnya pergantian pengurus memengaruhi terselenggaranya kegiatan kaderisasi. Struktur, program kerja, dan fokus strategis turut berubah mengikuti pergantian pengurus, menyebabkan program kaderisasi tidak dapat diterapkan jangka panjang. Perubahan struktur dari pusat hingga daerah memengaruhi proses kaderisasi, bahkan disebutkan bahwa PSI belum memiliki tingkatan kaderisasi formal karena masih berkonsentrasi pada stabilisasi kepengurusan internal. Pergantian elite organisasi berpotensi menghambat kesinambungan kebijakan dan melemahkan proses institusionalisasi kaderisasi.

Kegiatan Kaderisasi Secara *Online*

Kegiatan kaderisasi daring memudahkan partisipasi tanpa meninggalkan kepentingan lain, namun di sisi lain membatasi interaksi dan jejaring langsung antar kader. "Sebenarnya lebih suka *offline* ya, karena banyak bersinggungan dengan

teman-teman, banyak teman, tambah teman terutama ya, karena bersosialisasinya lebih intense. Cuma ya waktu tidak bisa kita lakukan secara *offline* makanya dilakukan secara *online*, itu lebih suka yang *offline* sebenarnya. *Fellowship*-nya itu lebih keras, jadi sesama kita bisa saling mengenal." Kegiatan daring tidak bisa memfasilitasi sosialisasi dengan baik sebagaimana luring. Akibatnya, banyak kader tidak saling mengenal dan kurang memiliki *sense of belonging* serta rasa kekeluargaan karena minimnya ruang interaksi langsung. Padahal PSI mengedepankan semangat solidaritas tinggi.

Pengaruh Kepemimpinan Perempuan

PSI pernah berada di bawah pimpinan ketua umum perempuan maupun laki-laki. Kepemimpinan perempuan berpengaruh terhadap representasi dan partisipasi kader perempuan karena adanya pengalaman kolektif sesama perempuan. "Berarti iya, kan. Katanya ketuanya. Maksudnya karena ketuanya cewek. Jadi dia mungkin mikir kayak, 'Ayo jalan bareng-bareng.' Dan dia mungkin lebih ngemong. Kayak ibu gitu loh, daripada yang sekarang. Berarti, bukan dari partai keseluruhan. Tapi dari pedenya. Jadi kita kayak, iya, ketuanya sama-sama perempuan." Pernyataan ini membuktikan bahwa posisi strategis yang diduduki perempuan dapat memengaruhi keseluruhan proses kaderisasi, terutama yang berkonsentrasi pada isu keperempuanan. Kepemimpinan DPD PSI Kota Semarang saat ini oleh laki-laki menunjukkan kemunduran terhadap pengawalan kader perempuan.

Kurangnya Filter dalam Menjaring Kader

PSI sangat terbuka menerima kader baru tanpa syarat atau aturan khusus. Hal ini selaras dengan semangat anti intoleransi,

namun justru menjadi hambatan dalam menyaring kader berkualitas. "Kelemahannya karena dia terbuka untuk semua orang dan tidak ada khusus-khususnya itu yang menjadi poin khusus untuk PSI lebih mungkin ada filter lagi supaya kadernya benar-benar yang tulus dan murni, benar-benar memang mau gabung bersama PSI, bersama-sama maju dengan PSI." Minimnya persyaratan khusus menunjukkan tidak adanya standar pasti dalam menjaring kader. Tiadanya standar mempersulit segmentasi kapasitas yang dibutuhkan. Kader yang masuk pun berada di bawah standar umum, membuat PSI harus bekerja lebih keras meningkatkan kapasitas melalui kaderisasi.

Mekanisme yang Belum Tegas

DPD PSI Kota Semarang belum memiliki mekanisme sanksi tegas mengikat kader. Jika pun ada, hanya teguran personal tanpa daya hukum. "Sanksi sih tidak ada, karena kan kita menyesuaikan dengan teman-teman kesibukan masing-masing. Jadi kita tidak pernah memberikan sanksi sih. Hanya saja mungkin karena misalnya belum ikut pendidikan dasar, oh ya berarti belum bisa jadi pengurus ini dulu. Paling seperti itu. Nanti setelah ikut boleh masuk, boleh jadi pengurus. Biasanya seperti itu yang ada." Tidak adanya sanksi tegas karena DPD memahami kesibukan kader. Namun pelanggaran ini justru membuat minim ikatan formal yang menyebabkan kader merasa tidak terikat dengan partai. Kaderisasi tidak diposisikan sebagai kewajiban struktural, melainkan disesuaikan dengan kondisi anggota.

Tidak Adanya Kurikulum Resmi

PSI masih berkonsentrasi memperkuat pondasi partai secara fungsional melalui struktur. Kurikulum partai hingga saat ini belum memiliki silabus resmi. Bahan ajar, materi, pelatihan belum terintegrasi

sistematis. "Iya nggak ada, dan itu kan online tuh. Kita kan juga kaderisasi ke yang bawah kan juga *online*. Jadi kaderisasi menurutku belum ada sih yang apa ya, yang bisa dinilai secara subjektif tuh menurutku belum ada." Salah satu informan yang lolos menjadi anggota dewan menyatakan bahwa DPD PSI Kota Semarang belum memiliki kurikulum yang dapat dinilai secara subjektif. Ketiadaan sistem kurikulum terstruktur membuat nilai-nilai partai sulit tercermin jelas, diperparah dengan kegiatan kaderisasi daring.

Hambatan Eksternal

Beban Ganda

Pada konteks kaderisasi DPD PSI Kota Semarang, beban ganda menghambat akses perempuan mengikuti semua tahapan kaderisasi secara berkelanjutan. Banyak kegiatan partai dilakukan di luar jam kerja, misalnya malam hari. Bagi kader perempuan—terutama ibu tunggal—hal ini menjadi tantangan besar karena dihadapkan pada pilihan menjadi kader atau ibu yang baik. "Hambatan itu ngatur waktunya sebenarnya. Buat keluarga. Apalagi anak-anakku masih kecil. Udah sih itu aja. Hambatan terbesar buat anak-anak." Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan partisipasi politik perempuan tidak hanya berasal dari struktur partai tetapi juga struktur sosial yang membebani tanggung jawab domestik utama kepada perempuan. Hambatan ini bersifat struktural dan berpotensi membatasi intensitas keterlibatan dalam kaderisasi maupun kontestasi politik. Beban ganda bukan permasalahan individual melainkan problematika struktural akibat kentalnya budaya patriarki.

Stigma Sosial

Stigmatisasi muncul dalam bentuk anggapan bahwa politik merupakan domain

laki-laki, tidak sesuai bagi perempuan karena menuntut sikap rasional, keras, dan hal-hal maskulin lainnya. Perempuan aktif dalam politik formal sering menjadi korban delegitimasi sosial, didiskredit dari kapasitas mereka dan dinilai subjektif negatif akibat identitas gender. Dalam kasus DPD PSI Kota Semarang, pelabelan negatif tidak hanya terjadi pada identitas kader sebagai perempuan, namun juga menyangkut identitas usia muda. Hal ini mengeskalasi tekanan karena di lapangan mereka diragukan akibat gender dan usia.

"Yang dari warga. Pernah aku diusir juga kok dari warga dari sesepuh. Terus jadi RT. Pernah aku diusir. Aku dibilang anak kemarin sore." Pengalaman diusir warga dan dianggap "anak kemarin sore" menunjukkan hambatan kultural-politik di tingkat masyarakat. Penolakan merefleksikan resistensi terhadap figur politik perempuan muda yang dianggap belum memiliki legitimasi sosial maupun otoritas simbolik. Dalam politik lokal yang masih kuat dengan nilai senioritas dan patriarki, perempuan muda menghadapi hambatan interseksional berbasis usia dan gender. Perempuan menghadapi tekanan besar di lapangan yang seharusnya bukan masalah jika mereka laki-laki. Stigmatisasi yang tidak jarang berujung kekerasan ini secara signifikan memengaruhi kinerja dan rasa percaya diri kader perempuan. Untuk meraih simpati masyarakat, kader perempuan harus melalui jalan jauh lebih terjal dibanding laki-laki hanya karena identitas yang di luar kontrol mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem kaderisasi politik di DPD PSI Kota Semarang tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan lolosnya caleg perempuan. DPD PSI Kota Semarang berada dalam kondisi ambivalen: di satu sisi memiliki struktur formal relatif

sistematis, namun di sisi lain praktiknya masih dipengaruhi dinamika momentum politik dan konsolidasi organisasi yang belum stabil. Secara normatif, PSI memiliki jenjang kaderisasi berlapis sesuai AD/ART, namun implementasinya di tingkat daerah belum sepenuhnya terlembaga secara stabil dan konsisten. Kaderisasi di DPD PSI Kota Semarang menunjukkan karakter kontekstual sekaligus situasional. Kontekstual karena terdapat penyesuaian materi berdasarkan persoalan lokal. Situasional karena intensitas pendidikan politik cenderung meningkat menjelang momentum elektoral. Pola ini menunjukkan bahwa kaderisasi belum berfungsi sebagai mekanisme pembentukan kader jangka panjang, melainkan masih berkorelasi kuat dengan kebutuhan elektoral.

Bagi calon anggota legislatif perempuan, kaderisasi menghadirkan pengalaman suportif secara interpersonal namun belum responsif secara struktural. Dukungan senior, ruang konsultasi, dan jejaring internal menjadi modal sosial signifikan. Namun materi dan sistem pembekalan masih bersifat umum, belum dirancang spesifik menjawab kebutuhan politik perempuan, terutama dalam menghadapi beban ganda domestik maupun resistensi sosial. Hambatan seperti manajemen waktu keluarga hingga penolakan berbasis usia dan gender menunjukkan bahwa tantangan perempuan bukan semata persoalan kapasitas individual, melainkan terkait struktur sosial dan budaya politik lokal.

Keterbukaan rekrutmen yang menjadi identitas partai membawa konsekuensi ambivalen: memperluas akses partisipasi politik namun melemahkan fungsi seleksi ideologis dan konsistensi kaderisasi. Minimnya sanksi dan longgarnya mekanisme disiplin menunjukkan partai masih mengedepankan pendekatan

persuasif, yang di satu sisi menjaga inklusivitas namun di sisi lain berpotensi menghambat konsolidasi kelembagaan.

SARAN

DPD PSI Kota Semarang perlu segera merancang sistem kaderisasi yang meliputi rekrutmen awal, kurikulum dan silabus, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang sistematis, terstruktur, dan rigid tanpa harus mengorbankan karakter partai sebagai partai inklusif. Sistem kaderisasi yang lebih sensitif gender juga diperlukan dalam membina kader-kader perempuan dan memaksimalkan potensi mereka. Hal ini demi mendorong partisipasi perempuan secara kualitas, tidak hanya sebagai pemenuhan syarat kuantitas semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Nurdin, N., & Fatkhuri. (2021). Pelatihan pendidikan politik untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader partai politik perempuan di Provinsi DKI Jakarta. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 542.
- Panbianco, A. (1988). *Political parties: Organization and power*. Cambridge: CUP Archive.
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (2025). Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Solidaritas Indonesia. Jakarta.
- Yuliantri, E., Nasution, F. A., Nasution, M., & Sutiarnoto, S. (2021). Affirmative action HAM dalam pemberdayaan perempuan di Papua. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 515.